

KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN: SEBUAH KAJIAN KONSEP
(Poverty and welfare: a study of the concept)

Mochamad Syawie

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Email:msyawie@yahoo.com
dan

Hemat Sitepu

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia

Abstrak

Tulisan ini bermaksud mengulas korelasi antara persoalan kemiskinan dengan konsep karakteristik negara kesejahteraan. Jika yang dimaksud dengan “negara kesejahteraan” adalah tata kenegaraan, di mana tugas pemerintah menyediakan atau menyelenggarakan/mengelola seluruh atau sebagian pelaksanaan kesejahteraan semua atau sebagian warganya, sudah jelas bahwa tugas sentral tata kenegaraan Indonesia, menurut pasal 34 UUD 1945, adalah negara kesejahteraan. Berdasarkan human development Report (HDR) terungkap bahwa di Indonesia terdapat orang miskin multidemensi yakni yang diukur menurut indikator pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi. Karakteristik negara kesejahteraan ditandai oleh empat hal pokok. Pertama, komitmen negara dalam menciptakan peluang lapangan pekerjaan untuk mengakomodasi melimpahnya angkatan kerja aktif-produktif. Kedua, adanya jaminan asuransi sosial yang berlaku bagi semua warga negara yang meliputi seluruh aspek kehidupan, terutama kesehatan dan bila terjadi kecelakaan. Ketiga, terselenggaranya pendidikan murah bermutu bagi rakyat, termasuk jaminan beasiswa bagi mereka yang berprestasi, tetapi berasal dari kalangan ekonomi lemah. Keempat, kebijakan sosial sebagai upaya redistribusi kekayaan.

Kata Kunci: kemiskinan, kesejahteraan

Abstract

This paper intends to review the correlation between poverty problems with the concept of the welfare state characteristics. If the term “welfare state” is an ordinance of the state, where the government’s duty to provide or organize / manage all or part of the implementation of well-being of all or part of its citizens, it is clear that the central task of governance of state of Indonesia, according to Article 34 UUD 1945, is the welfare state. Based on the Human Development Report (HDR) revealed that there are poor people in Indonesia that is multidimensional as measured by indicators of education, health and welfare ekonomi. Karakteristik welfare state is characterized by four main things. First, the commitment of countries in creating employment opportunities to accommodate the abundance of active, productive workforce. Secondly, the existence of social insurance that applies to all citizens who cover all aspects of life, especially in health and in the event of an accident. Third, the implementation of low-quality education for the people, including a guarantee scholarship for high achievers, but come from the weak economy. Fourth, social policy as a means of wealth redistribution.

Keywords: poverty, welfare

PENDAHULUAN

Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report/HDR) 2011 yang belum lama diterbitkan untuk Program Pembangunan

PBB (UNDP) kembali mengingatkan kita akan beberapa fakta, ilusi, dan pengharapan tentang kemiskinan, pemiskinan, dan kesejahteraan di Indonesia. Kesadaran akan kenyataan konkret

dan cita-cita kebangsaan ini sangat menentukan sikap kita menanggapi beragam umbaran para politikus sekarang tentang penghidupan rakyat banyak dan kebijakan ekonomi yang diberlakukan dan ditawarkan (Samsudin Berlian, 2011,h.7).

Human Development Report (HRD) menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 48,35 juta (20,8 persen) orang miskin multidemensi, yakni yang diukur menurut indikator penghasilan, pendidikan, dan usia harapan hidup. Walaupun ini angka besar, jumlah orang miskin sebenarnya cenderung terus berkurang dari tahun ke tahun. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia meningkat dari 0,423 pada tahun 1980 menjadi 0,617 pada 2011, hampir 50 persen dalam 30 tahun, suatu pencapaian yang cukup signifikan dibandingkan dengan banyak negara lain. Bank Dunia menyatakan, jumlah orang yang hidup di bawah 2 dollar AS (paritas daya beli) per hari pada 1984 adalah 88,4 persen, dibandingkan dengan 50,6 persen pada 2009, dan yang hidup di bawah 1,25 dollar AS pada 1984 adalah 62,8 persen, dibandingkan dengan 18,9 persen pada 2009. Persentase orang sangat miskin saat ini menurut BPS lebih kecil lagi, 13,33 persen, tetapi dengan garis kemiskinan yang terlalu rendah (2011).

Mengutip Berlian, bahwa data ini membuktikan tiga hal dalam satu generasi terakhir ini. Pertama, orang Indonesia pada umumnya cenderung makin sejahtera secara substansial. Kedua, telah terjadi pengurangan kemiskinan yang besar. Ketiga, separuh rakyat Indonesia masih sangat miskin. Pemerintah pada umumnya berusaha membesar-besarkan peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan itu dengan angka-angka statistik, tetapi cenderung mengecil-gecilkan keberadaan orang miskin yang masih besar. Sebaliknya, politikus oposisi serta pejuang dan pembela orang miskin biasanya cenderung menekankan kenyataan kemiskinan dan menyorot kesenjangan dengan cara mendramatisasi kepahitan hidup orang miskin dibandingkan dengan kemewahan orang kaya.

Tentang IPM yang tersebut di atas jika dilihat dari rentang waktu (1980 - 2011) memang ada pencapaian yang cukup signifikan. Tapi persoalannya untuk tahun 2011 Indonesia hanya 0.617 atau berada di peringkat kelima di ASEAN. Kalau demikian halnya, peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia melorot. Indonesia berada di peringkat 124 dari 187 negara pada 2011. Itu artinya peringkat Indonesia turun sebab pada 2010 masih berada di posisi 108 dari 169 negara (Media Indonesia, 4/11/2011).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di kawasan ASEAN dipegang oleh Singapura yang duduk di peringkat 26 dari 187 negara dengan angka indeks 0,866. Brunei berada di urutan 33 (0,838), disusul Malaysia di urutan 61 (0,761), Thailand di urutan 103 (0,682), dan Filipina di urutan 112 (0,644). Posisi Indonesia sedikit lebih baik daripada Vietnam yang berada di urutan 128 (0,583), Laos di urutan 138 (0,524), Kamboja di urutan 139 (0,523), dan Myanmar di urutan 149 (0,483). IPM adalah alat untuk mengukur kualitas sumber daya manusia suatu negara. Yang diukur ialah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi. IPM itulah yang menjadi dasar klasifikasi sebuah negara menjadi negara maju, Negara berkembang, atau negara terbelakang. Ironisnya, IPM Indonesia melorot justru di bidang pendidikan, padahal bidang itulah yang mendapatkan kucuran dana paling banyak dari APBN. Dalam APBN 2011 tercatat Rp. 2,46 triliun atau 20 persen dari total belanja Negara Rp. 1.229,6 triliun dialokasikan untuk pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persoalan Kemiskinan Dan Pembangunan

Secara konseptual terdapat indikasi bila negara melaksanakan perspektif negara kesejahteraan, warga masyarakatnya cenderung kemiskinannya akan berkurang tidak seperti yang ada sekarang ini. Dari data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk per Maret 2011 adalah 237.556.363 jiwa dengan angka

kemiskinan 12,5 persen atau sebanyak 29,7 juta jiwa.

Mengutip pendapat Carunia M Firdausy (2011), bahwa penjelasan perbedaan antara penurunan angka statistik dan kenyataan kemiskinan bukanlah sesuatu yang sulit. Paling tidak terdapat argumentasi utama mengapa demikian. *Pertama*, angka statistik bukan indikator “hidup” yang mampu untuk menjelaskan potret nyata kemiskinan. Angka statistik hanya indikator penunjuk suatu keadaan dengan batasan metode tertentu yang dipakai. *Kedua*, konsep dan definisi garis kemiskinan yang dipakai pemerintah selama ini yang bermasalah dan ketinggalan zaman. Dikatakan demikian karena, pertama, garis kemiskinan (GK) yang dipakai adalah GK absolut berdasarkan ukuran pengeluaran dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh BPS. Kedua, GK tersebut hanya merefleksikan ketidakcukupan pemenuhan kebutuhan hidup yang paling dasar manusia. *Ketiga*, GK absolute tersebut tak memperhitungkan zat nutrisi lain seperti protein yang diperlukan penduduk miskin. Akibatnya, tak mengherankan jika angka statistik dan kenyataan kemiskinan tak pernah nyambung.

Sri Palupi (2011) menyebutkan dalam banyak kasus terkait kemiskinan dan pembangunan, pemerintah cenderung menolak hak ekonomi, sosial, dan budaya. Penolakan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya sudah dimulai sejak pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto (PDB) sebagai indikator pembangunan. Dengan memilih indikator ini, pemerintah menyadari konsekuensinya: kebijakan dan program pembangunan bias pada kalangan atas yang meski jumlahnya kecil, berkontribusi tinggi terhadap PDB. Pemerintah mengesampingkan soal ketidakadilan. Dalam pemerintahan yang mengedepankan citra, ketidakadilan tentu saja tak boleh terkuak secara telanjang. Perlu ada mekanisme mengaburkannya melalui, misalnya, penetapan indikator kemiskinan dan pengangguran yang terlalu rendah.

Pengangguran dihitung dengan ukuran bekerja kurang dari satu jam dalam seminggu, yang jauh dari standar Internasional 35 jam perminggu.

Dalam hal ini pemerintah memaksakan anggapan bahwa dengan bekerja satu jam seminggu orang sudah dapat hidup layak. Sementara itu, kemiskinan diukur dengan garis kemiskinan yang nilainya kurang dari Rp 8.000 sehari. Dengan penghasilan kurang dari Rp 8.000 per hari, orang dianggap bisa makan kenyang dan memenuhi kebutuhan sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi (Palupi, 2011). Selain tak logis, penggunaan indikator seperti itu juga tak manusiawi dan berpotensi melanggar HAM. Jutaan orang miskin bisa kehilangan akses mendapatkan intervensi dari pemerintah hanya karena kondisi mereka berada sedikit di atas kriteria yang ditetapkan pemerintah. Padahal, dalam perspektif hak asasi, kemiskinan bukanlah sekadar perkara kurangnya pendapatan, tetapi juga perkara hilangnya kapabilitas dan peluang hidup bermartabat, rentan, dan tak berdaya. Kemiskinan adalah kondisi tak terpenuhinya hak asasi. Karena itu, dalam mengatasi kemiskinan dalam perspektif HAM, kelompok miskin tak dipandang sebagai korban yang tak punya daya, tetapi sebagai subyek hukum sekaligus aktor yang memiliki hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Palupi, 2011).

Komnas Perempuan memahami benar bahwa wajah kemiskinan adalah perempuan, baik dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga maupun menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan KPAI mengikuti dari dekat anak-anak yang selalu menjadi korban dari keluarga miskin. KPK juga menyadari bahwa dana yang dikorupsi mengurangi anggaran yang tersedia untuk penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, bagi Ombudsman, kualitas pelayanan pemerintahan sekaligus menjadi penyebab kemiskinan, dan akibat ketidakberdayaan orang miskin memperjuangkan hak-hak kewargaannya keluar dari kemiskinan. Dengan tampil bersama seperti ini, komisi nasional mengaktualkan perannya menyumbang terhadap penguatan

negara, dan kehadiran publik untuk lebih memastikan efektifitas tindakan kebijakan lanjutan memecahkan masalah kolektif kemiskinan. Memang, berbicara tentang kesenjangan dalam hubungannya dengan kebijakan yang salah arah bukanlah hal baru bagi kita. Semua memaklumi bahwa kesengsaraan rakyat yang demikian lamanya itu merupakan warisan feodalisme dan kolonialisme. Bung Karno, dalam pidato lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945, mengemukakan bahwa prinsip kesejahteraan atau keadilan sosial bermakna sebagai “prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka”. Karena itu, mengenyahkan kemiskinan dari bumi persada Indonesia sesungguhnya merupakan kewajiban dasar bagi negara dan bangsa (Dilon, 2011).

Sementara itu, terkesan bahwa arah kebijakan pembangunan memang sudah disandera elite sehingga tidak lagi ditujukan pada sektor-sektor ekonomi produktif tempat mayoritas rakyat menggantungkan nasibnya. Bangun ekonomi yang lebih ekstraktif bukan hanya tidak membawa nilai tambah, tapi malah semakin meminggirkan rakyat. Inilah penyebab utama langgengnya kesenjangan, dimulai dari kesenjangan antar dan intra sektor, antar dan intra-daerah, hingga antar dan intra-kawasan. Akibat kebijakan agraria dan perkreditan yang diskriminatif, warisan kesenjangan penadapatan dan derajat sosial antara si kaya dan si miskin itu terlihat semakin mencolok.

Sejak akhir Perang Dunia, kita telah menyaksikan kemajuan luar biasa sistem kapitalis. Perekonomian Amerika Utara, Eropa dan Jepang mengalami kemajuan luar biasa ke tingkat yang pernah terjadi, dan jutaan orang menjadi sangat kaya. Akan tetapi bersamaan dengan itu, miliaran orang di bumi yang sama tertinggal.

Dengan mengurangi kesenjangan tragis antara Belahan Bumi Utaradan Belahan Bumi Selatan, perwakilan semua bangsa di dunia berkumpul di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada tahun 2000. Mereka setuju untuk menetapkan delapan sasaran penting yang

ingin dicapai pada tahun 2015, yang kemudian disebut Sasaran Pembangunan Milenium. Yang paling penting dalam kesepakatan ini adalah mengurangi angka kemiskinan sampai setengahnya.

Bangladesh adalah sebuah Negara yang telah mengalami kemajuan pesat dalam rangka pencapaian Sasaran Milenium itu. Angka kemiskinannya telah turun dari 57 persen yang diperkirakan di tahun 1991 menjadi 40 persen di tahun 2005. Walaupun masih terlalu tinggi, angka tersebut terus turun sekitar dua persen per tahun, dengan tiap persentase mencerminkan perbaikan yang bermakna dalam kehidupan jutaan penduduk Bangladesh. Negeri itu telah berada di jalur yang benar menuju sasaran mengurangi kemiskinan sampai setengah jumlah semula pada tahun 2015 (Muhammad Yunus, 2011, hal: 219). Yang lebih menakjubkan, pertumbuhan perekonomian Bangladesh yang pesat telah disertai sedikit perbaikan dalam hal kesenjangan antara warga kaya dan warga miskin (sebagaimana diungkapkan oleh indikator-indikator statistik seperti koefisien Gini, sebuah ukuran untuk “*disperse statistic*” yang lazim digunakan untuk mendefinisikan tingkat kesenjangan pendapatan dalam suatu populasi).

Untuk beberapa tahun, banyak negara lain di Asia menunjukkan keberhasilan yang sama seperti Bangladesh. Secara umum, di banyak negara seluruh dunia, pelan-pelan keadaan mulai membaik. Jumlah penduduk yang hidup dengan dengan pendapatan kurang dari 1,25 dolar per hari berkurang dari taksiran semula 1,8 miliar menjadi 1,4 miliar dari 1990 sampai 2005 - walaupun ini baru mewakili sekitar 25 persen penduduk dunia.

Namun sejak itu, angin segar yang ditiupkan oleh pencaanangan Sasaran Milenium telah dipadamkan oleh sebuah krisis global yang kompleks dalam bidang ekonomi, keuangan, pertanian, lingkungan dan sosial. Taksiran baru-baru ini menyiratkan sekitar 55 juta hingga 90 juta orang telah bergabung ke dalam kelompok warga sangat miskin, semuanya akibat krisis global yang jelas bukan dipicu oleh mereka.

Perihal Kesejahteraan

Menurut Kompas (19/6/2012), jika yang dimaksud dengan “negara kesejahteraan” adalah tata kenegaraan, di mana pemerintah menyediakan atau menyelenggarakan/mengelola seluruh atau sebagian pelaksanaan kesejahteraan semua atau sebagian warganya, sudah jelas bahwa tugas sentral tata kenegaraan Indonesia, menurut Pasal 34 UUD 1945, adalah negara kesejahteraan. Jelasnya Pasal 34 itu menyatakan 1) fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara; 2) Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Betapapun konstitusi dengan jelas mengamanatkan sistem negara kesejahteraan, realitas republik sekarang ini justru kian menjauh dari ciat-cita. Meski konstitusi merupakan pedoman bagi penyelenggara pemerintahan dan dalam pembuatan kebijakan, pemerintahan cenderung kehilangan orientasi (Kompas, 19/06/2012, h.6). Di tengah sistem ekonomi politik yang menumbuhsurburkan korupsi dan kekerasan, bicara tentang negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi terasa seperti terlempar kembali ke zaman rimba. Betapa tidak. Ketika hidup manusia keluar dari rimba, maka kata, data, dan argument menjadi indikator penting dari peradaban. Sesuatu bisa diubah dengan kekuatan kata, data dan argumen, demikian kesimpulan pakar ekonomi politik, hasil diskusi Kompas (19/6/2012) tentang “Konstitusi dan Negara Kesejahteraan: Dari Cita-cita Menuju Realita”. Meski konstitusi menegaskan cita-cita Negara kesejahteraan, menagih terwujudnya Negara kesejahteraan dengan bersenjatakan konstitusi saja tidak akan menggerakkan penguasa. Konstitusi membutuhkan konstituen.

Bagaimana potret kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia memasuki usia kemerdekaannya yang ke-66 tahun ini? Kendati

selalu ada angka-angka yang menghibur, penderitaan masih terus saja mewarnai kehidupan para petani gurem, buruh tani, buruh pabrik, nelayan gurem, buruh nelayan, pedagang kaki lima, pengangguran, dan kaum terpinggirkan lainnya. Sehari-hari begitu banyak terekam kisah nestap orang-orang miskin yang mengusik rasa kemanusiaan kita di negeri yang katanya merdeka ini dan kaya akan sumber daya alam yang melimpah.

Melihat kenyataan pahit kehidupan rakyat seperti ini, timbul pertanyaan mendasar, apakah kita masih mewarisi kepekaan, kepedulian, semangat, dan keberanian berkorban para pendiri republik. Bagaimana sesungguhnya suasana batin penyelenggara Negara dalam melihat penderitaan rakyat. Apakah “roh kebangsaan” kita sudah benar-benar mati (baca: Dillon, 2011).

Marciano Vidal sebagaimana dikutip Aloys Budi Purnomo (2011) mengungkapkan, karakteristik negara kesejahteraan ditandai oleh empat hal pokok. Pertama, komitmen Negara dalam menciptakan peluang lapangan pekerjaan untuk mengakomodasi melimpahnya angkatan kerja aktif-produktif. Kedua, adanya jaminan asuransi sosial yang berlaku bagi semua warga Negara yang meliputi seluruh aspek kehidupan, terutama kesehatan dan bila terjadi kecelakaan. Ketiga, terselenggaranya pendidikan murah bermutu bagi rakyat, termasuk jaminan beasiswa bagi mereka yang berprestasi, tetapi berasal dari kalangan ekonomi lemah. Keempat, kebijakan sosial sebagai upaya redistribusi kekayaan. Untuk yang terakhir ini, upaya itu sungguh-sungguh cerminan wajah solidaritas baru dari yang kuat kepada yang lemah, bukan sekadar obat untuk menyembuhkan kesenjangan social.

Mewujudkan karakteristik negara kesejahteraan adalah tugas para pemimpin bangsa. Mereka bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup warganya sehingga terciptalah tatanan hidup bersama yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Negara dan penyelenggara negara bertanggung jawab menyelenggarakan semua pelayanan publik sehingga standar kesejahteraan masyarakat terjamin, terpenuhi,

tanpa mengecualikan seorang pun. Kegagalan para pemimpin memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat merupakan kegagalan mereka dalam menyelenggarakan amanahnya. Selama ini ada kecenderungan yang terjadi, bukannya masyarakat mencontoh para pemimpinnya dalam hal saling melindungi antar warga, melainkan justru rakyatlah yang memberikan contoh kepada para pemimpin dalam mengembangkan antusiasme solidaritas kewarganegaraan. apparatus Negara selalu terlambat mewujudkan solidaritas dibandingkan masyarakat warga merespon berbagai persoalan di tingkat akar rumput. Adalah kewajiban dan tanggung jawab negara, apparatus negara dan para pemimpinnya, untuk mewujudkan keempat karakteristik negara kesejahteraan tersebut.

Komitmen

Komitmen untuk menciptakan lapangan kerja demi menekan angka pengangguran secara domestik belum maksimal. Terkait dengan kewajiban kedua, menyediakan asuransi sosial untuk semua warga di bidang kesehatan, negara pun belum maksimal memberikannya. Alih-alih memberikan jaminan asuransi sosial bagi warganya, biaya pengobatan begitu tinggi di negeri ini. Akibatnya muncul ungkapan peyoratif orang miskin dilarang sakit karena pasti akan kesulitan menanggung biaya kesehatan. Bahkan, masyarakat kelas menengah pun mendadak bisa “jatuh miskin” gara-gara biaya kesehatan (baca Purnomo, 2011). Alih-alih memberikan fasilitas publik yang nyaman dan aman, kecelakaan lalu lintas, baik darat, laut, maupun udara, sering terjadi. Ujung-ujungnya, negara kurang bertanggung jawab dan mempersalahkan oknum bawahan di lapangan, misalnya dalam kasus kecelakaan kereta api. Pendidikan murah? Masih jauh panggang dari api. Sudah gitu, mutu pendidikan juga masih bisa diperdebatkan, terutama untuk sekolah dasar dan menengah yang dikelola negara.

Kewajiban negara untuk menyejahterakan rakyatnya cenderung masih jauh dari harapan. Jangankan mengatur redistribusi kekayaan untuk mengatasi kesenjangan sosial, negara

justru cenderung menciptakan ruang-ruang dan jarak yang kian jauh antara yang kaya dan miskin. Pajak yang disetor, yang mestinya diimplimentasikan untuk kesejahteraan rakyat, justru dikorupsi oleh mafia pajak yang berkolaborasi dengan apratus negara. Perhatian terhadap daerah-daerah tertinggal masih sangat kurang sehingga sejumlah daerah di republik ini masih berada dalam kondisi yang mengenaskan.

Oleh karena itu, sudah saatnya para pemimpin negara ini menghadirkan solidaritas bangsa dengan mewujudkan karakteristik negara kesejahteraan bagi rakyatnya.

KESIMPULAN

Menurut pandangan Dudley Seers, tokoh utama pendukung indikator nonekonomi ini, sebagaimana dikutip Moeljarto (1987), menegaskan bahwa ada tiga hal yang perlu ditanyakan tentang pembangunan suatu Negara, yaitu apa yang tengah terjadi dengan kemiskinan; apa yang tengah terjadi dengan pengangguran; dan apa yang tengah terjadi dengan ketimpangan. Apabila jawaban atas ketiga hal tersebut adalah “penurunan secara substansial” maka tidak diragukan lagi bahwa negara tersebut baru mengalami periode pembangunan.

Benar apa yang dikatakan Oliveir de Schutter (2011), sebagaimana dikutip Imam Cahyono (2011), bahwa kelaparan, rawan pangan lebih sebagai persoalan politik ketimbang masalah pertanian. Sumber utama kelaparan bukan kelangkaan melainkan kebijakan. Bencana kelaparan bukanlah takdir yang tak dapat dielakkan, melainkan bergantung pada bagaimana pemimpin politik mengatasi skandal tersebut.

Orchestra tata kelola pangan global tak lepas dari campur tangan Bank Dunia, IMF, dan WTO. Liberalisasi ekonomi memaksa negara berkembang membuka pasar, sementara negara maju memproteksi dan mensubsidi petaninya. Hampir semua yang kelaparan adalah warga miskin, petani gurem di pedesaan yang menjadi pembeli produksi pangan. Sementara korporasi

dan tuan tanah dianakemaskan dengan berbagai fasilitas dan bantuan.

Dibanding China dan India, Indonesia negara berkembang sangat liberal. Indeks Keterbukaan Ekonomi AS hanya 54 persen, sementara Indonesia mencapai 80 persen. Tatkala kita bangga mencapai swasembada pangan, pada saat bersamaan diiringi banjirnya barang impor. Setidaknya 65 persen kebutuhan pangan kita masih bergantung pada impor, seperti gandum, kedelai, susu, gula, daging sapi dan garam.

Seperti kaset rusak diputar kembali, Indonesia merupakan negeri kaya yang rawan pangan. Peta ancaman kelaparan dan rawan pangan nyari tak beranjak. Tahun 2009, 214 kabupaten dengan tingkat kemiskinan rata-rata dan 65 kabupaten dengan kemiskinan lebih dari 30 persen tersebar di provinsi Papua, Maluku, NTT, NTB dan Aceh. Dari total penduduk 237,6 juta jiwa, setidaknya 65,34 juta jiwa rentan rawan pangan atau 27,5 persen penduduk (Cahyono, 2011). Tak banyak inovasi ditorehkan pemerintah. Paling banter kebijakan reaktif ala pemadam kebakaran.

Sebaliknya, kebijakan pemerintah yang amat dibanggakan seperti Program *Food Estate* dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia secara kasatmata memihak korporasi besar. Investor lebih diprioritaskan pemerintah ketimbang petani. Bagaimanapun, persoalan global harus dipecahkan secara global. Semangat liberalisasi kebablasan dalam kebijakan domestik tentu kontradiktif dengan agenda diplomasi Indonesia di kancah internasional. Ironis, sebagai inisiator dan koordinator kelompok Negara G-33, kebijakandalam negerinya justru mengikis ketahanan pangan dan menyengsarakan petani domestik dan kaum miskin lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, E.Y. (2009). *Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Aloys, B.P. (2011, 7 Nopember). Solidarisme dan Negara Kesejahteraan. *Harian Kompas*.
- Dillon, H.S. (2011, 16 September). Cukup Sudah Pembiaran Kemiskinan. *Majalah Tempo*.
- Imam, C. (2011, 14 Nopember). Ancaman Geopolitik Pangan. *Harian Kompas*.
- Muhammad, Y.(2011). *Bisnis Sosial Sistem Kapitalisme Baru Yang Memihak Kaum Miskin*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Samsudin, B. (2011, 7 Desember). Kemiskinan dan Kesejahteraan. *Harian Kompas*.
- Sri, P. (2011, 9 Desember). Abai Sejak Dalam Pikiran. *Harian Kompas*.